



Membangun Identitas Melalui Teks: Perjalanan Panjang Sejarah yang Indonesia-Sentris

Building Identity Through Text: The Long Journey of Indonesia-Centric History

Muhamad Zikri¹, Etmi Hardi², Haldi Patra³

Universitas Negeri Padang

Email: zikrikrenz@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 28-06-2026

Revised : 30-06-2026

Accepted : 02-07-2026

Published : 04-07-2026

Abstract

This research examines the long process of transformation of historical writing (historiography) in Indonesia, from a Dutch-centric colonial approach to a national historiography with an Indonesian-centric perspective. For centuries, the writing of the archipelago's past was monopolized by the Dutch colonial government as a tool of political legitimacy, marginalizing the role of indigenous people and fostering a sense of inferiority. Using a literature review, this paper traces how awareness of decolonization of historical thought began to emerge and culminated in the First National History Seminar in 1957. The results demonstrate that the overhaul of historical narratives—such as the change in the labeling of regional resistance figures from "rebels" to "heroes"—was not simply an attempt to straighten out the facts of events. Furthermore, this shift in texts represented a struggle for meaning, used strategically to forge unity and restore national dignity. This study concludes that independence in writing about the past is an absolute requirement in the project of building national character and identity, with the future challenge of presenting a history that is more critical, objective, and inclusive of all levels of society.

Keywords: *National Historiography, Colonial Historiography, Indonesia-Centric*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji proses panjang transformasi penulisan sejarah (historiografi) di Indonesia, dari pendekatan kolonial yang *Neerlandosentris* menuju historiografi nasional yang berperspektif *Indonesia-sentris*. Selama berabad-abad, penulisan masa lalu Nusantara dimonopoli oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai alat legitimasi politik yang meminggirkan peran masyarakat pribumi dan memicu inferioritas mental. Melalui metode tinjauan pustaka (*literature review*), tulisan ini menelusuri bagaimana kesadaran dekolonisasi pemikiran sejarah mulai bangkit dan memuncak pada Seminar Sejarah Nasional Pertama tahun 1957. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perombakan narasi sejarah—seperti perubahan pelabelan tokoh perlawanan daerah dari "pemberontak" menjadi "pahlawan"—bukanlah sekadar upaya meluruskan fakta peristiwa. Lebih jauh dari itu, pergeseran teks ini merupakan sebuah pertarungan makna yang digunakan secara strategis untuk merajut persatuan dan memulihkan martabat bangsa. Kajian ini menyimpulkan bahwa kemandirian dalam menulis masa lalu adalah syarat mutlak dalam proyek pembangunan karakter dan identitas nasional, dengan tantangan ke depan untuk menyajikan sejarah yang lebih kritis, objektif, dan merangkul peran seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: *Historiografi Nasional, Historiografi Kolonial, Indonesia-Sentris*

PENDAHULUAN

Selama berabad-abad, masa lalu kepulauan Nusantara tidak diceritakan oleh penduduknya sendiri, melainkan oleh mereka yang datang untuk menguasai. Dalam berbagai catatan dan literatur



yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial, bangsa kita sering kali hanya ditempatkan sebagai figuran, objek penderita, atau bahkan dilabeli sebagai "pemberontak" dan "ekstremis" ketika berusaha mempertahankan tanah airnya (Kartodirdjo, 1982: 24). Penulisan masa lalu yang sangat bias ke arah Eropa atau *Neerlandosentris* ini tidak hanya merekam peristiwa demi kepentingan administratif dan legitimasi penjajah, tetapi secara tidak sadar turut menanamkan rasa rendah diri pada masyarakat pribumi.

Kemerdekaan politik yang diraih pada tahun 1945 rupanya tidak otomatis membebaskan ingatan kolektif bangsa ini. Banyak intelektual saat itu menyadari bahwa kedaulatan sebuah negara tidak akan pernah utuh jika masyarakatnya masih melihat diri mereka sendiri melalui kaca mata bangsa lain (Purwanto, 2006: 15). Dari keresahan inilah muncul sebuah kesadaran besar untuk merombak total cara kita membaca dan menceritakan masa lalu.

Masyarakat Indonesia harus dikembalikan ke tempat yang seharusnya: sebagai pelaku utama atau subjek aktif di tanahnya sendiri. Pergeseran paradigma menuju sudut pandang yang Indonesia-sentris ini menjadi sebuah tonggak pemikiran yang revolusioner dalam tradisi keilmuan di tanah air, yang puncaknya mulai disuarakan secara formal pada Seminar Nasional Sejarah Pertama tahun 1957 di Yogyakarta (Abdullah & Surjomihardjo, 1985: 30).

Tulisan ini akan menelusuri bagaimana perjalanan bangsa kita dalam merebut kembali narasinya. Melalui teks dan catatan masa lalu yang mulai ditulis dari sudut pandang bangsa sendiri, kita akan melihat bahwa upaya ini bukanlah sekadar urusan meluruskan fakta peristiwa. Lebih jauh dari itu, penulisan ulang ini adalah sebuah perjuangan krusial untuk membangun karakter, mengangkat martabat, dan merumuskan identitas nasional kita yang sejati (Kuntowijoyo, 1995: 18).

METODE

Artikel ini disusun menggunakan metode tinjauan pustaka (*literature review*) atau studi kepustakaan. Pendekatan ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian tanpa harus terjun langsung ke lapangan (Zed, 2004: 3). Dalam konteks penulisan sejarah dan historiografi, metode kepustakaan bukan sekadar mengumpulkan buku, melainkan proses analisis kritis terhadap teks dan gagasan yang membentuk pemikiran masyarakat dari masa ke masa.

Metode tinjauan pustaka dipilih karena gagasan mengenai penulisan ulang masa lalu sangat erat kaitannya dengan evolusi teks dan dokumen sejarah. Penulis mengkaji berbagai literatur keilmuan yang relevan, mulai dari karya-karya sejarawan terkemuka, jurnal akademik, hingga buku-buku yang merekam jejak perkembangan penulisan masa lalu di Indonesia. Melalui metode ini, dilakukan interpretasi dan komparasi (perbandingan) antara literatur yang masih bercorak kolonial dengan teks-teks kritis yang lahir pasca-kemerdekaan (Gottschalk, 1986: 45).

Data dan informasi yang telah dihimpun dari berbagai literatur tersebut kemudian disintesis dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Tujuan dari metode penjabaran ini adalah untuk mengurai secara sistematis proses dekolonisasi pemikiran sejarah, serta melihat bagaimana bangsa Indonesia secara bertahap berhasil merumuskan narasinya sendiri sebagai instrumen utama dalam membangun identitas nasional (Suryabrata, 2003: 18).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Bayang-Bayang Kolonial: Teks Sebagai Alat Legitimasi Penjajah

Sebelum pendekatan yang berpusat pada bangsa sendiri (Indonesia-sentris) lahir, wacana mengenai masa lalu Nusantara didominasi secara mutlak oleh historiografi kolonial yang bersifat *Neerlando-sentris* atau berpusat pada kepentingan Belanda. Dalam literatur-literatur sejarah pada masa itu, eksistensi kepulauan ini seolah-olah baru dianggap bermula ketika kapal-kapal ekspedisi Eropa pertama kali membuang sauh di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Teks-teks tersebut ditulis oleh para pejabat pemerintah, misionaris, dan sejarawan Eropa murni untuk melayani kepentingan administrasi, justifikasi eksploitasi ekonomi, serta sebagai bahan laporan resmi kepada pemerintah pusat di Den Haag (Kartodirdjo, 1982: 31). Alam pikiran Eropa ditempatkan sebagai pusat peradaban dunia, sementara Nusantara sekadar dianggap sebagai wilayah tak bertuan yang menanti untuk "ditemukan" dan "diberadabkan".

Karakteristik paling mencolok dari teks warisan kolonial ini adalah marginalisasi atau peminggiran peran masyarakat pribumi secara sistematis. Bangsa Indonesia tidak pernah diposisikan sebagai pembuat sejarah (*history maker*) atau subjek yang memiliki kehendak bebas, melainkan hanya dijadikan latar belakang yang pasif dari panggung kebesaran bangsa Eropa. Buku-buku pedoman pendidikan masa itu, seperti karya F.W. Stapel yang berjudul *Geschiedenis van Nederlandsch Indië*, menjadi rujukan standar yang secara masif mendiktekan glorifikasi terhadap aktivitas *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Teks-teks ini memuja keberhasilan ekspansi militer dan kehebatan strategi para gubernur jenderal Belanda dalam menaklukkan wilayah, sementara struktur sosial dan peradaban asli masyarakat Nusantara nyaris tidak mendapatkan porsi penceritaan yang layak (Purwanto, 2006: 22). Penguasa lokal seperti raja dan sultan sering kali direpresentasikan secara negatif, sekadar sebagai pihak yang feodal, korup, atau penghambat kemajuan.

Lebih dari sekadar catatan rentetan peristiwa masa lampau, teks-teks sejarah kolonial sejatinya beroperasi sebagai alat legitimasi politik yang sangat tajam. Dengan menarasikan bahwa kedatangan mereka adalah sebuah misi suci untuk membawa "peradaban", "modernisasi", dan "ketertiban" (*rust en orde*), pemerintah kolonial mencoba mencari pembenaran atas praktik kolonialisasi yang mereka lakukan (Abdullah & Surjomihardjo, 1985: 45). Konsekuensi dari cara pandang sepihak ini sangat fatal bagi catatan sejarah kita: setiap bentuk perlawanan dari rakyat lokal untuk mempertahankan kemerdekaan tanah airnya sama sekali tidak diakui sebagai bentuk patriotisme. Sebaliknya, tokoh-tokoh besar seperti Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, atau Tuanku Imam Bonjol dicatat secara resmi dalam dokumen-dokumen Belanda sebagai "pemberontak", "pengacau keamanan", "ekstremis", atau korban dari "fanatisme buta".

Narasi diskriminatif yang tertuang dalam teks-teks ini menjadi sangat berbahaya karena secara langsung memicu terjadinya penjajahan mental (*mental colonization*). Teks-teks bias ini diwariskan dan dibaca oleh generasi muda pribumi melalui institusi pendidikan kolonial, seperti sekolah-sekolah bumiputera. Jika dikonsumsi terus-menerus tanpa daya kritis, literatur tersebut secara perlahan menanamkan dogma inferioritas—sebuah keyakinan psikologis bahwa bangsa pribumi memang secara kodrati tertinggal, lemah, dan sudah takdirnya berada di bawah perwalian bangsa Barat (Klooster, 1985: 12). Dominasi pemikiran yang menjebak inilah yang pada akhirnya



disadari oleh kaum intelektual bumiputera sebagai belenggu yang lebih berbahaya daripada penjajahan fisik. Oleh karena itu, membongkar narasi kolonial dan merebut kembali hak untuk menulis masa lalu menjadi syarat mutlak bagi bangsa Indonesia untuk bisa menemukan dan membangun kembali identitasnya yang merdeka.

Titik Balik 1957: Kesadaran Merumuskan Narasi Bangsa Sendiri

Kemerdekaan fisik yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 membawa euforia pembebasan secara politik dan militer, namun nyatanya tidak serta-merta memerdekakan bangsa ini dari belenggu narasi masa lalunya. Pada dekade pertama pasca-kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia menghadapi sebuah ironi yang tajam: negara ini telah berdaulat, tetapi buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah masih merupakan warisan dari kurikulum kolonial Belanda. Siswa-siswa Indonesia, yang kini hidup di alam merdeka, masih harus membaca dan menghafal bahwa nenek moyang mereka adalah "pemberontak" yang menghalangi laju "peradaban Eropa" (Kuntowijoyo, 1995: 35). Kesadaran bahwa kedaulatan sebuah negara tidak akan pernah utuh tanpa adanya kedaulatan atas ingatan masa lalunya mulai tumbuh kuat di kalangan kaum intelektual dan pendidik pada masa itu.

Keresahan intelektual ini akhirnya menemukan momentum puncaknya pada tanggal 14 hingga 18 Desember 1957. Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan sebuah perhelatan akademik bersejarah, yakni Seminar Sejarah Nasional Pertama di Yogyakarta. Seminar ini bukanlah pertemuan akademis biasa, melainkan dapat dipandang sebagai sebuah "proklamasi kemerdekaan" bagi pemikiran sejarah Indonesia. Para pemikir, guru, dan sejarawan terkemuka seperti Soedjatmoko, Sartono Kartodirdjo, dan Muhammad Yamin berkumpul dengan satu agenda utama yang sangat mendesak: merumuskan pondasi historiografi nasional yang berlandaskan pada perspektif Indonesia-sentris (Abdullah & Surjomihardjo, 1985: 62).

Dalam seminar tersebut, disepakati sebuah paradigma baru yang radikal bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek penderita atau sekadar figuran dalam lembaran sejarahnya sendiri. Pendekatan *Neerlandosentris* harus secara total digantikan dengan pendekatan yang menjadikan bangsa Indonesia—baik itu rakyat jelata, kaum bangsawan, maupun tokoh pergerakan—sebagai aktor utama (*history maker*) yang memiliki dinamika, nilai budaya, dan kehendak merdekanya sendiri. Hal ini berarti setiap peristiwa masa lampau, mulai dari kejayaan kerajaan Hindu-Buddha, masuknya Islam, masa kolonialisme, hingga revolusi fisik, harus dilihat dan dievaluasi dari sudut pandang kepentingan nasional dan penderitaan rakyat Indonesia, bukan dari untung-ruginya pemerintah kolonial (Kartodirdjo, 1982: 40).

Seminar tahun 1957 ini menghasilkan sebuah landasan filosofis bahwa sejarah nasional harus berfungsi sebagai instrumen pendidikan kebangsaan. Historiografi tidak lagi hanya bertujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu akademis, tetapi memikul beban moral yang berat, yaitu membangkitkan rasa kebanggaan nasional (*national pride*), memupuk patriotisme, dan mengikat berbagai suku bangsa di Nusantara ke dalam satu identitas kesatuan keindonesiaan. Keputusan-keputusan dalam seminar inilah yang kemudian menginisiasi proyek besar penulisan ulang buku-buku sejarah standar nasional, yang tidak hanya bertujuan meluruskan disinformasi kolonial, tetapi



juga secara aktif merekonstruksi identitas bangsa yang sempat terkoyak oleh narasi imperialisme (Purwanto, 2006: 51).

Dari "Pemberontak" Menjadi Pahlawan: Pergeseran Epik Indonesia-Sentris

Pergeseran paradigma yang dirumuskan pada Seminar Sejarah Nasional 1957 tidak berhenti pada tatanan teori akademik belaka, melainkan langsung diimplementasikan secara agresif dalam perombakan teks-teks sejarah, terutama buku pelajaran sekolah. Manifestasi paling nyata dan epik dari transisi historiografi kolonial menuju historiografi nasional ini terlihat pada perubahan status, pelabelan, dan karakterisasi tokoh-tokoh perlawanan lokal. Dalam teks-teks warisan kolonial, terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan para pemimpin daerah sangat bernuansa peyoratif atau merendahkan. Mereka secara konsisten dan sistematis dilabeli sebagai "pemberontak" (*opstandelingen*), "pengacau keamanan", atau "ekstremis" yang merusak ketertiban umum bentukan pemerintah Hindia Belanda (Kartodirdjo, 1982: 55).

Kita bisa melihat contoh konkret pada penulisan tokoh-tokoh perlawanan daerah seperti Pangeran Diponegoro di Jawa, Teuku Umar di Aceh, atau Tuanku Imam Bonjol di Minangkabau. Dalam arsip dan literatur Belanda, perlawanan besar seperti Perang Jawa (1825-1830) dinarasikan sebagai sebuah pembangkangan terhadap otoritas sah pemerintah kolonial. Narasi ini sengaja dibangun untuk menjustifikasi pengerahan kekuatan militer besar-besaran oleh Belanda. Namun, melalui kacamata historiografi nasional yang Indonesia-sentris, narasi bias tersebut dibongkar dan diputar balik 180 derajat. Tokoh-tokoh ini tidak lagi dilihat sebagai pengacau atau pembangkang, melainkan diangkat derajatnya sebagai pejuang kebebasan (*freedom fighters*) dan pahlawan nasional. Mereka dicatat dengan tinta emas sebagai patriot yang rela mengorbankan harta serta nyawa demi mempertahankan kedaulatan tanah tumpah darahnya dari cengkeraman imperialisme asing (Purwanto, 2006: 68).

Pergeseran narasi ini menunjukkan bahwa penulisan sejarah sejatinya adalah pertarungan semantik atau pertarungan makna. Kata-kata yang digunakan dalam literatur direvisi secara cermat oleh para sejarawan nasional. Sebagai contoh, istilah "Pemberontakan Diponegoro" diganti menjadi "Perang Diponegoro". Perubahan satu kata ini memiliki dampak psikologis yang luar biasa besar; kata "perang" menyejajarkan posisi sang pangeran sebagai pihak yang setara dan berdaulat melawan kekuatan asing, bukan sebagai bawahan yang sekadar melawan majikannya. Dekolonisasi bahasa ini menjadi alat yang sangat ampuh untuk mencuci bersih alam bawah sadar bangsa dari sisa-sisa mental terjajah (Klooster, 1985: 42).

Dengan mengubah label pemberontak menjadi pahlawan, negara sedang menyusun sebuah panteon (kumpulan tokoh agung) yang akan dijadikan teladan moral bagi generasi penerus. Pengangkatan tokoh-tokoh kepahlawanan dari berbagai penjuru Nusantara—mulai dari Sultan Hasanuddin di Makassar, Sisingamangaraja XII di Tanah Batak, hingga Kapitan Pattimura di Maluku—bukanlah tanpa perhitungan sosiologis dan politis. Teks sejarah digunakan secara strategis sebagai benang perajut persatuan nasional. Melalui kisah-kisah heroisme ini, generasi muda yang lahir di berbagai pulau dapat merasakan ikatan emosional dan penderitaan historis yang sama, sehingga mengkristalkan kesadaran mereka sebagai satu kesatuan identitas bangsa Indonesia yang utuh (Abdullah & Surjomihardjo, 1985: 75).



Menulis Masa Lalu, Membangun Identitas Masa Depan

Perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam merebut kembali narasi masa lalunya membuktikan bahwa sejarah bukanlah sekadar tumpukan dokumen usang atau rentetan angka tahun yang statis. Sejarah adalah sebuah arena diskursus yang hidup, tempat di mana identitas, martabat, dan arah masa depan sebuah bangsa terus-menerus dibentuk serta dipertahankan. Transformasi radikal dari historiografi kolonial yang sangat *Neerlandosentris* menuju historiografi nasional yang memegang teguh prinsip *Indonesia-sentris* merupakan salah satu pencapaian intelektual paling krusial pasca-kemerdekaan (Kuntowijoyo, 1995: 50). Melalui teks-teks masa lalu yang ditulis dan direkonstruksi oleh tangan bangsa sendiri, Indonesia secara perlahan namun pasti berhasil melepaskan diri dari rantai inferioritas psikologis yang diwariskan oleh berabad-abad masa penjajahan.

Pada akhirnya, merekonstruksi masa lampau dengan menempatkan masyarakat pribumi sebagai subjek utama adalah sebuah langkah mutlak dalam proyek besar pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*). Buku-buku teks sejarah nasional yang kini menjadi pedoman di ruang-ruang kelas berfungsi lebih jauh dari sekadar medium transfer pengetahuan kognitif; literatur tersebut merupakan instrumen pendidikan yang esensial untuk menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara (Abdullah & Surjomihardjo, 1985: 90). Ketika generasi muda membaca heroisme para pendahulu yang bangkit melawan opresi, atau mempelajari dinamika kearifan lokal yang telah ada jauh sebelum Eropa datang, secara tidak langsung mereka sedang merajut memori kolektif yang menguatkan akar keindonesiaannya. Identitas nasional yang kokoh inilah yang menjadi fondasi pertahanan mental paling berharga bagi bangsa ini dalam menghadapi arus globalisasi.

Meskipun demikian, historiografi nasional tidak boleh mengalami stagnasi dengan hanya berhenti pada tahap glorifikasi atau sekadar membalikkan fakta kolonial secara reaktif dan emosional semata. Tantangan terbesar di era kontemporer bagi penulisan sejarah yang *Indonesia-sentris* adalah bagaimana menjaga ekuilibrium (keseimbangan) antara tuntutan semangat nasionalisme dengan kaidah objektivitas dan integritas keilmuan (Purwanto, 2006: 82). Narasi nasional di masa depan harus terus berkembang menjadi historiografi yang lebih kritis dan multidimensional. Penulisan ini tidak boleh lagi hanya dimonopoli oleh riwayat hidup pahlawan besar dan kaum elit politik, tetapi harus mulai memberi ruang yang adil bagi suara-suara rakyat jelata, kaum petani, buruh, hingga perempuan yang sering kali luput dari panggung utama, padahal mereka turut memeras keringat dalam roda pergerakan bangsa (Kartodirdjo, 1982: 70).

Sebagai penutup, ikhtiar untuk menulis ulang masa lalu adalah sebuah proses kebudayaan yang berkesinambungan dan tidak akan pernah selesai. Setiap generasi memikul tanggung jawab sejarah untuk memaknai kembali perjalanannya sesuai dengan konteks dan tantangan zamannya. Teks-teks sejarah yang kita tulis dan ajarkan hari ini adalah cermin identitas yang akan membentuk cara pandang generasi mendatang terhadap bangsanya. Dengan berhasil menyusun sebuah sejarah yang merdeka dari bayang-bayang narasi kolonial, bangsa Indonesia sejatinya telah merebut kembali hak prerogatifnya untuk menentukan takdir dan jati dirinya sendiri di kancah peradaban dunia.



KESIMPULAN

Pergeseran historiografi Indonesia dari paradigma *Neerlando-sentris* menuju *Indonesia-sentris* bukanlah sekadar perubahan teknis dalam penulisan sejarah, melainkan sebuah bentuk dekolonisasi pemikiran yang krusial bagi bangsa Indonesia. Selama masa penjajahan, teks sejarah digunakan oleh pemerintah kolonial sebagai alat legitimasi politik yang meminggirkan peran masyarakat pribumi dan melabeli pejuang kemerdekaan sebagai pemberontak. Hal ini secara perlahan menanamkan inferioritas mental atau penjajahan psikologis pada generasi bangsa.

Momentum Seminar Sejarah Nasional 1957 di Yogyakarta menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia secara sadar merebut kembali narasinya. Dengan menempatkan masyarakat Indonesia sebagai subjek utama (*history maker*), narasi sejarah dirombak total; tokoh-tokoh daerah yang tadinya dicap sebagai pengacau diangkat derajatnya menjadi pahlawan nasional. Perubahan narasi ini terbukti menjadi instrumen strategis yang ampuh dalam merajut memori kolektif, menumbuhkan kebanggaan nasional, dan membangun identitas bangsa yang merdeka.

Ke depannya, tantangan historiografi nasional tidak lagi sekadar melawan narasi kolonial, tetapi bagaimana menyajikan sejarah yang lebih objektif, kritis, dan multidimensional. Penulisan masa lalu harus terus berkembang dengan tidak hanya mengedepankan tokoh-tokoh besar atau elit politik, tetapi juga memberikan porsi yang adil bagi peran rakyat biasa. Pada akhirnya, kemandirian dalam menulis masa lalu adalah cerminan dari kedaulatan sebuah bangsa dalam menentukan identitas dan masa depannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Surjomihardjo, A. (1985). *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah (Terjemahan Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: UI Press.
- Kartodirdjo, S. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Klooster, H. A. J. (1985). *Indonesiers Schrijven Hun Geschiedenis [Orang-orang Indonesia Menulis Sejarah Mereka]*. Dordrecht: Foris Publications.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Purwanto, B. (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*. Yogyakarta: Ombak.
- Suryabrata, S. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.